

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang dapat menjadi penggerak perekonomian suatu negara baik secara mikro maupun makro. Bank memiliki peran yang telah tercantum dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan antara pihak kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit*). Bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Dalam hal ini, bank mempunyai peran penting dalam perputaran uang suatu perekonomian negara. Menurut Septianto (2010) menyebutkan bahwa di Indonesia, perbankan mempunyai pangsa pasar sebesar kurang lebih 80% dari keseluruhan sistem keuangan yang ada. Pada tahun 2012-2013, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa UMKM mampu menyerap tenaga kerja 114.114.082 orang atau sebesar 96,99% dari total tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha skala kecil, menengah dan besar (DEKOP, 2013).

Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. *Pertama*, sebagai penyedia mekanisme alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk itu, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien tersebut, maka barang yang

dapat diperdagangkan dengan cara tukar-menukar akan memakan waktu yang lama. *Kedua*, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan dana yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. (Putra : 2013)

Dilihat pada tabel 1.1 perekonomian di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada periode 2011-2014 terjadi peningkatan dari segi Aset, Dana Pihak Ketiga, Kredit setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan di Yogyakarta telah cukup baik sebagai lembaga intermediasi. Sedangkan NPL (*Non Performing Loan*) mengalami fluktuatif dan penurunan rata-rata setiap tahunnya. Pada tahun 2011 triwulan I merupakan nominal paling tinggi yaitu sebesar 3.32%. Ini mengindikasikan bahwa perbankan memiliki tingkat kredit macet yang tinggi. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Karim, Chan dan Hasan (2010:131) bahwa semakin tingginya tingkat NPL akan mengurangi biaya efisiensi, dengan demikian semakin tinggi NPL akan mengakibatkan tidak efisiensinya suatu perbankan dalam pengoperasiannya.

Lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa bagi salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPR/BPRS memiliki peran penting dalam memberikan pembiayaan sektor UMKM di setiap daerah baik desa maupun perkotaan. Menurut Septianto dan Widiharih (2010 : 41), lembaga BPR memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, proses yang cepat dan skema

kredit yang mudah disesuaikan serta lokasi tersebar di seluruh daerah baik perkotaan maupun perdesaan dibandingkan bank umum. Seperti yang diungkapkan Masyita dan Habib (2013 : 60) bahwa BPR dan BPRS memiliki tingkat pemberian pembiayaan secara cepat dan kemudahan dalam proses pembiayaannya.

**Tabel 1. 1 Laporan Perkembangan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2014**

Indikator	Satuan	2011				2012				2013				2014			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Aset	Miliar Rp.	29.14	30.78	32.23	33.92	35.55	37.36	39.993	40.75	41.45	43.034	45.7	47.22	48.520	49.52	52.22	53.68
Pertumbuhan	%	13,35	17,34	20,39	16,21	22,03	21,37	24,09	20,12	16,59	15,20	14,26	15,88	17,05	15,07	14,27	13,67
Dana Pihak Ketiga	Miliar Rp.	24.92	26.05	27.65	28.78	30.01	31.29	33.246	34.88	35.53	36.672	38.670	39.82	40.270	41.81	43.56	44.65
Pertumbuhan	%	16,28	15,39	20,28	17,33	20,13	20,13	20,26	21,23	18,40	17,20	16,32	14,14	13,33	14,01	12,64	12,15
Kredit	Miliar Rp.	15.04	16.15	17.06	17.94	19.786	18.48	20.680	21.840	22.16	23.920	25	25.571	26.28	28.15	29.02	29.75
Pertumbuhan	%	22,07	24,28	26,31	23,03	22,50	22,87	21,24	21,74	19,86	20,89	20,88	17,08	18,60	17,69	16,07	16,33
NPL (Gross)	%	3,32	3,25	3,05	2,41	2,70	2,75	2,78	2,35	2,62	2,49	2,45	1,97	2,29	2,44	2,35	2,11

Sumber : Bank Indonesia Regional DIY, 2011-2014

Pada periode 2011-2014, BPR dan BPRS mengalami perkembangan yang cukup baik. Perkembangan yang cukup baik ini dapat dilihat dari jumlah BPR/BPRS dan jumlah kantor yang beroperasi. Jumlah BPR setiap tahunnya mengalami penurunan akan tetapi tidak mengurangi jumlah kantor yang ada. Sedangkan pada BPRS terjadi peningkatan jumlah BPRS setiap tahunnya. Perkembangan BPR/BPRS dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut :

**Tabel 1. 2 Perkembangan BPR dan BPRS**

<b>Indikator</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>BPR</b>	1669	1653	1635	1643
Jumlah Kantor	4172	4425	4678	4895
<b>BPRS</b>	155	158	163	163
Jumlah Kantor	364	401	402	424

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2014

Selain perkembangan pada kuantitas, BPR memiliki keunggulan dalam penghimpunan dan penyaluran dana pada masyarakat DIY. Ini terbukti banyaknya kredit yang diberikan lebih banyak daripada Bank Umum Syariah. Besarnya penyaluran yang diberikan dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat pada BPR lebih banyak daripada Bank Umum Syariah. BPR juga tersebar pada lokasi perdesaan dan perkotaan, ini mempermudah masyarakat dalam memakai jasa BPR dan BPRS.

**Tabel 1. 3 Indikator BPR, BPRS dan Bank Umum Syariah di Yogyakarta**

<b>INDIKATOR</b>	<b>BPR</b>				<b>BPRS</b>				<b>Bank Umum Syariah</b>			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
<b>Aset (Rp Triliun)</b>	2.725	3.263	4.079	4.560	168	242	267	308	2.196	2.634	3.416	3.401
<b>Penghimpun Dana (Rp Triliun)</b>	1.814	2.193	2.530	2.934	124	189	212	235	1.669	2.257	2.864	2.842
<b>Penyaluran Dana (Rp Triliun)</b>	2.039	2.389	2.808	3.294	151	199	233	307	1.386	1.639	1.997	2.214
<b>NPL/NPF</b>	5,51	4,81	3,90	4,42	4,89	4,95	5,24	6,69	1,84	1,13	1,25	3,60

Sumber : Laporan Perkembangan Perekonomian DIY 2011-2014

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, penghimpunan dana dari tahun 2011-2014 lebih sedikit dibandingkan dengan penyaluran dananya. Besarnya pemberian

penyaluran dana BPR dan BPRS dikarenakan salah satu faktornya adalah besarnya tingkat persaingan usaha nasabah, dan BPR/BPRS juga merupakan lembaga keuangan yang mudah dan cepat dalam pemberian kredit/pembiayaan. Dengan demikian besarnya kredit tersebut akan mempengaruhi NPL itu sendiri. Salah satu penyebabnya adalah keterlambatan pengembalian dananya. Dengan besarnya kredit macet (NPL/NPF) menunjukkan kinerjanya masih banyak yang belum efisien.

Perkembangan BPR/BPRS membuat persaingan semakin ketat. Persaingan tersebut membuat lembaga keuangan harus meningkatkan kinerja pengoperasiannya. Efisiensi pada perbankan merupakan alat ukur dalam menentukan tingkat kinerja perbankan. Jika tingkat efisiensi suatu perbankan optimal, maka perbankan tersebut dapat dikatakan mengalami kinerja yang sudah baik dalam pengoperasionalnya. Menurut Nugraha (2013:275) menyebutkan bahwa Efisiensi merupakan kemampuan suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan benar dengan perhitungan rasio perbandingan antara input dan output. Dimana efisiensi adalah bagaimana menggunakan input yang minimal dengan menghasilkan output yang semaksimal mungkin. Dengan begitu tingkat kinerja suatu perbankan dapat dilihat dari tingkat input dan output perbankan yang akan diketahui apakah perbankan tersebut sudah mengalami efisien atau tidak.

Dengan latar belakang di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tingkat efisiensi antara BPR dan BPRS dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analisis* (DEA). Sehingga objek

penelitian ini adalah BPR dan BPRS di DIY. Pengukuran efisiensi menggunakan input dan output BPR dan BPRS yang akan mengetahui tingkat perbandingan kinerja BPR dan BPRS. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan inefisiensi maka dapat dilakukan kebijakan yang dapat digunakan guna meningkatkan kualitas kinerja BPR / BPRS yang tidak efisien. Sehingga peneliti mengambil judul **Perbandingan Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menggunakan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efisiensi BPR Konvensional dan BPR Syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2011-2014?
2. Apa saja penyebab ketidakefisienan BPR Konvensional dan BPR Syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011-2014?
3. Apakah terdapat Perbedaan tingkat efisiensi BPR Konvensional dan BPR Syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2011-2014?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian pada masalah di atas. Maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Variabel yang digunakan untuk meneliti adalah variabel input (Dana Pihak Ketiga, Aset tetap, dan biaya operasional) dan variabel output (Kredit/Pembiayaan, dan pendapatan Operasional).
2. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan BPR dan BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011 –2014.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat efisiensi BPR Konvensional dan BPR Syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2011-2014.
2. Menganalisis dan mengidentifikasi penyebab inefisiensi di BPR Konvensional dan BPR Syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2011-2014.
3. Mengetahui perbandingan efisiensi BPR Konvensional dan BPR Syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2011-2014.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat Penelitian ini secara Teoritis untuk :

1. Pengetahuan dalam studi keuangan ekonomi khususnya perbankan.
2. Membandingkan tingkat efisiensi kinerja BPR Konvensional dan BPR Syariah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara Praktis ditunjukkan untuk :

1. Dapat dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan tingkat efisiensi kinerja BPR Konvensional dan BPR Syariah yang baik.